

## IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN KELOMPOK PERIKANAN DI KECAMATAN LAMPIHONG KABUPATEN BALANGAN (Studi Kasus Desa Kandang Jaya dan Desa Kusambi Hilir)

Irma Mariani<sup>1</sup>, Siti Raudah<sup>2</sup>, Ni Made Musiyani Anjasmari<sup>3</sup>

Program Studi Administrasi Publik  
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai  
Email: [irmamariania@gmail.com](mailto:irmamariania@gmail.com)

### ABSTRAK

Program bantuan kelompok perikanan diberikan dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat melalui peningkatan ekonomi dan usaha, penelitian ini bertujuan mengetahui tentang Implementasi Program Bantuan Kelompok Perikanan Di Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan (Studi Kasus Desa Kandang Jaya Dan Desa Kusambi Hilir) dan faktor yang mempengaruhinya, hasil penelitian sudah baik. *Pertama*, subvariabel komunikasi pada Indikator konsistensi juga sudah sesuai dan tentunya masyarakat juga menerima informasi tersebut dengan baik. *Kedua*, subvariabel sumber daya pada indikator wewenang sudah bertanggung jawab. *Ketiga*, subvariabel disposisi pada indikator respon implementor sudah sesuai terkait respon petugas dalam menjalankan program perikanan sudah baik dan juga kelompok sangat terbantu dengan adanya respon yang baik dari petugas. Kemudian indikator kemampuan petugas sudah sesuai. *Keempat*, subvariabel struktur biokrasi pada indikator *Standart Operating Procedures* (SOP) sudah sesuai. Dan indikator fragmentasi juga sudah sesuai. Faktor Pendukung *Pertama*, adanya perhatian pemerintah daerah. *Kedua*, adanya partisipasi masyarakat. Faktor Penghambat *Pertama*, Belum dirakuratnya data mengenai kebutuhan yang diinginkan *Kedua*, Kelanjutan mengenai program ini belum ada..

**Kata Kunci** : Implementasi, Bantuan, Perikanan

### ABSTRACT

*The fisheries group assistance program is provided with the aim of improving the welfare of the community through economic and business improvements, this study aims to find out about the Implementation of the Fisheries Group Assistance Program in Lampihong District, Balangan Regency (Case Study of Kandang Jaya Village and Kusambi Hilir Village) and the factors that influence it, the results of the study are good. First, the communication subvariable in the consistency indicator is also appropriate and of course the community also receives the information well. Second, the resource subvariable in the authority indicator is responsible. Third, the disposition subvariable in the implementor response indicator is appropriate regarding the response of officers in carrying out the fisheries program is good and the group is also very helped by the good response from officers. Then the officer's ability indicator is appropriate. Fourth, the bureaucratic structure subvariable in the Standard Operating Procedures (SOP) indicator is appropriate. And the fragmentation indicator is also appropriate. Supporting Factors First, the attention of the local government. Second, there is community participation. Inhibiting Factors First, Inaccurate data on desired needs Second, There is no continuation of this program.*

**Keywords**: Implementation, Assistance, Fisheries

## PENDAHULUAN

Pemerintah Daerah berhak mengeluarkan berbagai kebijakan publik untuk tujuan tersebut dengan catatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah diputuskan oleh pemerintah pusat. Dengan berlakunya otonomi daerah ini maka daerah otonom dapat mewujudkan adanya suatu kebijakan umum yakni langkah yang diambil oleh pemerintah untuk menyelesaikan masalah-malmasalah publik (*public issues*) yang terdapat di lingkungan sekitar masyarakat daerah.

Kabupaten Balangan sebagai daerah otonom berhadapan dengan karakteristik permasalahan yang berbeda-beda dengan daerah lainnya. Kabupaten Balangan juga berhadapan dengan masalah urbanisasi, keamanan, transportasi, lingkungan, pengelolaan kawasan khusus, dan masalah sosial kemasyarakatan lain yang memerlukan pemecahan masalah secara sinergis melalui berbagai instrument. Salah satunya adalah Program Bantuan Kelompok Perikanan. Sesuai dengan Peraturan Bupati Balangan Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Dari Pemerintah Kabupaten Balangan. Pemberian batuan hibah dan bantuan sosial ini diberikan secara nontunai kepada kelompok perikanan.

Pemerintah Kabupaten Balangan menyiapkan lahan seluas delapan hektare sebagai sentra budidaya ikan lokal sebagai upaya meningkatkan sektor perikanan di “Bumi Sanggam” ini. Bupati Balangan H. Abdul Hadi mengatakan program peningkatan pertumbuhan ekonomi di bidang perikanan dan pencaanangan Kabupaten Balangan sebagai sentra budidaya ikan lokal akan dimasukkan dalam APBD perubahan 2023. (sumber: <https://mediakalimatannews.com>).

Peran sektor Perikanan di beberapa Negara diketahui dengan tajamnya peningkatan produksi perikanan dunia. Secara geografis Indonesia terdiri dari beribu-ribu pulau yang sebagian besar wilayahnya sebanyak 62% merupakan perairan Laut, Selat dan Teluk, sedangkan 38% lainnya adalah daratan yang didalamnya juga memuat kandugan air tawar dalam penangkapan dan pemeliharaan ikan laut serta organisme lainnya di perairan pantai serta perairan lepas pantai.

Budidaya ikan merupakan suatu upaya dalam memanfaatkan sumber daya yang ada disekitar untuk mencapai tujuan bersama dalam kelompok. Budidaya merupakan bentuk campur tangan manusia dalam meningkatkan produktivitas perairan. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka memproduksi ikan dalam suatu wadah atau media terkontrol dan berorientasi pada keuntungan. Meningkatkan produktivitas perairan khususnya ikan air tawar dan bertujuan mencari keuntungan.

Kegiatan pengembangan budidaya perikanan dilakukan untuk mewujudkan ketahanan pangan, kesehatan, serta peningkatan kesejahteraan dan pembangunan wilayah. Budidaya ikan menjadi sebuah kegiatan usaha yang berkontribusi bagi penyediaan lapangan kerja dan sumber pendapatan, baik secara langsung maupun tak langsung bagi masyarakat. Dengan banyaknya aktivitas budidaya ikan, maka semakin luas juga kesempatan kerja bagi masyarakat setempat sehingga dapat mengurangi angka pengangguran.

Area budidaya ikan yang terdapat di Kabupaten Balangan meliputi darat dan sungai. Budidaya darat merupakan tempat yang sangat diminati oleh sebagian masyarakat Kabupaten Balangan, terutama untuk pembuatan kolam budidaya ikan, baik yang sumber air nya bagus atau pun yang menggunakan tadah hujan. Program bantuan salah satu nya adalah sarana dan prasarana.

Program bantuan kelompok perikanan yang diberikan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kabupaten Balangan berupa: sarana budidaya bioflok, sarana budidaya keramba, dan sarana budidaya kolam tanah. Budidaya bioflok adalah salah satu sistem budidaya ikan menggunakan teknik rekayasa lingkungan yang mengandalkan pasokan oksigen dan pemanfaatan mikroorganisme, sistem kerja bioflok dengan cara mengubah kandungan amonia yang ada di kolam menjadi protein microbail yang dilakukan oleh

mikroba. Budidaya bioflok tidak cocok ditempatkan di ruangan *fuul indoor* karena terdapat mikroorganismenya yang berfotosintesis, sehingga membutuhkan cahaya matahari.

Pemerintah Kabupaten Balangan memberikan bantuan kelompok perikanan kepada seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Balangan. Berikut daftar nama kecamatan dan desa yang mendapatkan bantuan tersebut:

**Tabel 1.1**  
**Daftar Nama Desa Yang Mendapatkan Bantuan**

1	2	3	4
1.	Batumandi	Desa	Timbun Tulang, Tariwin, Mampari, Munjung Rt.03, Guha, Banua Hanyar Rt. 05, Teluk Mesjid, Gunung Manau.
2.	Lampihong	Desa	Teluk Karya, Kandang Jaya, Kusambi Hilir, Jimamun, Sungai Tabuk.
3.	Awayan	Desa	Pulantan, Baru, Tangalin, Putat, Bihara Hilir, Badalungga, Pulantan.
4.	Tebing Tinggi	Desa	Gunung Batu, Sungsum, Juuh.
5.	Paringin	Desa	Lamida Bawah, Dahai, Inan, Hujan Mas,
			Layap, Sungai Ketapi, Mangkayahu, Haur Batu, Lasung Batu, Balida, Balang, Babayau, Paran.
6.	Paringin Selatan	Desa	Maradap, Baruh Bahinu Dalam, Baruh Bahunu Luar, Batu Piring, Halubau Utara, Harapan Baru, Binjai, Bungin, Lingsir, Morgo Mulyo, Telaga Purun.
7.	Juai	Desa	Hukai, Sei Batung, Galumbang, Tundi, Tawahan.
8.	Halong	Desa	Binjai Punggal, Mauya, Binuang Santang.

Berdasarkan realita yang peneliti temukan pada observasi awal, peneliti menemukan beberapa fenomena masalah Implementasi Program Bantuan Kelompok Perikanan Di Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan (Studi Kasus Desa Kandang Jaya Dan Desa Kusambi Hilir) yaitu :

## 1. Desa Kandang Jaya

- a. Bantuan yang diberikan oleh pemerintah belum sesuai dengan kebutuhan. Khususnya untuk fasilitas yang disalurkan pemerintah kepada kelompok perikanan masih belum memadai dan fasilitas penyuluh juga masih belum memadai, seperti kurangnya alat transportasi yang digunakan oleh penyuluh untuk melakukan pengecekan kedesa-desa mengenai penyaluran bantuan perikanan dan untuk melakukan penyuluhan perikanan kepada masyarakat.
- b. Kurangnya bantuan pemerintah kepada kelompok perikanan tentang cara pemasaran dan memfasilitasi berkenaan dengan pemasaran hasil olahan ikan. Pemerintah kurang memberikan perhatian khusus untuk pengelolaan hasil ikan. Masyarakat hanya bisa menjual hasil panen kepada pengepul ikan atau memasarkan ikan dipasaran. Kelompok perikanan mengharapkan pemerintah mengadakan pelatihan tentang pengolahan hasil ikan supaya masyarakat bisa lebih terampil dan memberikan inovasi-inovasi terbaru tentang pengolahan hasil ikan serta bisa membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat. (Sumber: hasil wawancara dengan ketua kelompok perikanan).

## 2. Desa Kusambi Hilir

- a. Masih kurangnya sumber daya manusia dalam program bantuan perikanan ini, seperti kurangnya staf petugas penyuluh hal ini berdampak pada kurangnya tenaga penyuluhan yang di adakan instansi ke desa-desa.
- b. Belum adanya kelanjutan dari pemerintah mengenai program ini, seperti kurangnya penyuluhan dan pelatihan dari pemerintah tentang cara budidaya ikan yang benar. *“Pemerintah jarang memberikan penyuluhan dan pelatihan kepada kelompok perikanan dikecamatan dan di desa-desa sehingga banyak pengelola yang belum paham mengenai budidaya ikan yang baik dan benar dan ini juga berdampak pada budidaya yang tidak dirawat dengan baik serta perawatan ikan yang kurang baik sehingga menimbulkan kegagalan panen, dan ukuran ikan yang kurang berkembang”* (Sumber: hasil wawancara dengan anggota kelompok perikanan). Penyuluhan perikanan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku saha perikanan agar mereka mau dan mampu mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan dan sumber lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, dan pendapatan. Tujuan dari penyuluhan untuk meningkatkan pengetahuan individu, kelompok, dan masyarakat sehingga dapat diterapkan.

## METODE

Terkait Penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tipe deskriptif-kualitatif. Adapun Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis terdiri dari wawancara, observasi dan dokumentasi. Sumber data yang diambil adalah informan sebanyak 10 orang. Setelah data terkumpul kemudain dianalisis dengan teknik meliputi reduksi data, penyajian data dan verifikasi atau penerikan kesimpulan untuk mendapatkan hasil dari penelitian.

## PEMBAHASAN

### a. Komunikasi

#### 1) Transmisi

Transmisi adalah penyaluran informasi dari pembuat kebijakan kepada penerima kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa terkait indikator transmisi pada Implementasi Program Bantuan Kelompok Perikanan di Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan (Studi Kasus Desa Kandang Jaya dan Desa Kusambi Hilir) dalam hal penyaluran komunikasi belum berjalan dengan baik karena penyuluhan yang diberikan instansi masih jarang terlebih lagi belum adanya pelatihan khusus untuk masyarakat mengenai pembudidayaan ikan dan pengolahan hasil ikan.

Hal ini belum sesuai dengan teori Goerge C. Edward III (Leo Agustino, 2019:136) yaitu keberhasilan suatu kebijakan dilihat dari penyaluran informasi.

#### 2) Kejelasan

Kejelasan kebijakan adalah kemudahan kebijakan yang dapat dipahami dan dimengerti oleh masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan terkait indikator kejelasan Cukup baik dan pemberitahuan informasi melalui pengumuman bahwa penyampaian informasi disalurkan melalui sosialisasi/penyuluhan. Hal ini diberitahukan dan adanya tujuan sosialisasi dan dalam berbentuk pengumuman spanduk dan masyarakat juga sudah memahami dengan jelas terkait informasi yang disampaikan saat penyuluhan mengenai hal terkait dalam program bantuan perikanan dan jika ada masyarakat yang belum paham maka boleh bertanya dengan pihak penyuluh.

Hal ini sesuai dengan teori George C. Edward III (Leo Agustino, 2019:136) yaitu apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan harus jelas agar mudah diimplementasikan.

#### 3) Konsistensi

Sifat atau kegiatan kebijakan harus dilakukan secara berulang dan teratur.

Hasil wawancara dan hasil observasi terkait indikator konsistensi dalam Sudah baik dan kepada penyuluh selaku pelaksana langsung dilapangan untuk penyuluhan sudah dilaksanakan dengan baik. Serta perihal informasi penting yang diberikan terkait pelaksanaan program ini juga disampaikan melalui penyuluhan dan jika ada masyarakat yang belum paham maka diperbolehkan bertanya langsung saat penyuluhan.

Hal ini sesuai dengan teori George C. Edward III (Leo Agustino, 2019:136) yaitu perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi sudah diterapkan dan dijalankan.

### b. Sumber Daya

#### 1) Staf

Staf adalah orang atau sumber daya manusia yang menjalankan sebuah kebijakan, tanpa staf tidak aka nada kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan terkait indikator staf atau sumber daya manusia belum memadai dalam proses pelaksanaannya baik dari tahap awal sampai akhir penyaluran bantuan. Karena jumlah PPL atau penyuluh di Kabupaten Balangan bidang Perikanan hanya berjumlah enam orang untuk mewilayahi satu Kecamatan satu orang hal ini berdampak pada kurangnya kunjungan penyuluh ke Desa dan jarang adanya penyuluhan karena jarak dari Desa satu ke Desa lainnya juga membutuhkan waktu yang

lumayan lama dan kelompok perikanan di kedua Desa tersebut sering kerja sama dalam mengelola program bantuan ini dan ketika kelompok memiliki kendala dalam pengelolaan bantuan maka tidak bisa bertanya langsung jalan pintasnya hanya bisa melalui Wa saja.

Hal ini belum sesuai dengan teori George C. Edward III (Leo Agustino, 2019:136) keberadaan sumber daya manusia sangat penting.

2) Anggaran

Anggaran adalah sumber daya finansial.

Hasil wawancara dan observasi terkait indikator anggaran/finansial sudah memadai dan mencukupi karena setiap tahunnya dari tahun 2023 anggaran sudah naik sampai dengan tahun sekarang, karena Bapak Bupati sudah konsen kearah perikanan dan Penyaluran bantuan yang diberikan pemerintah kepada kelompok perikanan juga sudah lengkap.

Hal ini sesuai dengan teori Goergi C. Edward III (Leo Agustino, 2019:136) sumber daya finansial adalah salah satu penunjang kebijakan.

3) Wewenang

Adalah kewajiban yang harus dijalankan oleh seseorang.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi indikator wewenang dapat disimpulkan Sudah baik dan petugas sudah bertanggung jawab dalam tugas yang diberikan oleh instansi. Petugas juga sudah menjalankan tugas sesuai dengan arahan yang diberikan istansi serta penyuluh juga sigab dalam membantu kelompok jika ada kelompok yang mengalami kendala dalam program bantuan tersebut.

Hal ini sesuai dengan teori Goergi C. Edward III (Leo Agustino, 2019:136) yaitu kewenangan merupakan otoritas yang diberikan kepada seseorang.

4) Fasilitas

Fasilitas fisik adalah sarana prasarana yang menunjang dalam kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi indikator fasilitas yang diberikan pemerintah dalam program bantuan perikan belum cukup memadai jadi dengan cara menanggulangnya para kelompok patungan dalam memenuhi fasilitas tersebut dan untuk fasilitas penyuluhpun juga belum memadai karena penyuluh masih kekurangan alat transportasi berupa motor jadi untuk sementara waktu penyuluh masih menggunakan alat transportasi pribadi.

Hal ini belum sesuai dengan teori Goergi C. Edward III (Leo Agustino, 2019:136) yaitu bahwa fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam kebijakan.

c. Disposisi

1) Respon Implementor

Sikap dari pembuat kebijakan.

Berdasarkan hasil wawanacara dan hasil observasi terkait indikator Respon Implementor sudah berjalan dengan baik.

Hal ini sesuai dengan teori Goergi C. Edward III (Leo Agustino, 2019:136) yaitu implementor memiliki disposisi yang baik, maka kebijakan akan dapat berjalan efektif

2) Kemampuan Petugas

Petugas harus mempunyai keahlian dalam menjalankan kebijakan.

Berdasarkan hasil wawanacara dan hasil observasi terkait indikator Kemampuan Petugas dalam program bantuan perikanan sudah bagus dapat dilihat dari mereka penyampaian informasi, menjekaskan bagaimana pengelolaan yang baik dan penyuluh juga bersikap ramah kepada masyarakat sehingga memudahkan masyarakat dalam bertanya lebih lanjut mengenai program

bantuan yang diberikan dan ketika adahal yang kurang dimengerti atau ada kendala pada saat pembudiadayaan ikan maka kelompok dapat bertanya langsung dan penyuluh juga sangat sigab jika kelompok membutuhkan bantuan dari penyuluh.

Hal ini sesuai dengan teori Goergi C. Edward III (Leo Agustino, 2019:136) yaitu Implementor kebijakan dalam pengangatan staf harus mempunyai kemampuan.

### 3) Kesesuaian Dengan Kebutuhan Masyarakat

Kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat merupakan kesesuain dengan harapan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dan hasil observasi terkait indikator Kemampuan Petugas belum memadai karena masih banyak dari kelompok yang bekerjasama dalam mencukupi kebutuhan yang memang diperlukan didalam pembudidayaan dengan cara mengeluarkan dana pribadi untuk membeli apa yang memang mereka perlukan dan jika meminta kembali bantuan tersebut memerlukan waktu yang lumayan lama karena banyaknya kelompok yang menginginkan bantuan tersebut.

Hal ini belum sesuai dengan teori Goergi C. Edward III (Leo Agustino, 2019:136) yaitu Implementor kebijakan dalam memberikan bantuan harusnya sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan oleh masyarakat.

### d. Struktur Biokrasi

#### 1) *Standart Operating Procedures* (SOP)

SOP adalah suatu prosedur dalam acuan pelaksanaan kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa terkait indikator *Standart Operating Procedures* (SOP) sudah baik atau sudah sesuai dan pelaksana juga sudah menjalankan program ini sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan instansi. Penyuluh juga selalu melakukan evaluasi atau kunjungan ke Desa dalam beberapa bulan sekali gunanya untuk meninjau bagaimana sumber daya di Desa tersebut dan melakukan pengecekan kepada kelompok yang sudah menerima bantuan apakah bantuan yang diberikan sudah berkembang atau belum berkembang.

Hal ini sesuai dengan teori Goergi C. Edward III (Leo Agustino, 2019:136) yaitu suatu prosedur atau aktivitas terencana yang harus dilakukan

#### 2) Fragmentasi

Tujuannya untuk menyebar tanggung jawab melalui struktur kerja.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi koordinasi antara pihak pelaksana sudah sesuai dan sudah baik, hal ini dapat dilihat dari adanya kerjasama serta koordinasi yang dilakukan oleh pihak pelaksana dengan instansi.

Hal ini sesuai dengan teori Goergi C. Edward III (Leo Agustino, 2019:136) yaitu menyebar tanggung jawab agar kebijakan lebih mudah dilaksanakan.

### **Faktor Pendukung**

Faktor pendukung dalam proses implementasi kabijakan merupakan suatu yang lazim terjadi dimana-mana, dan setiap program pasti mempunyai masalah masing-masing. Sehingga penanganannya pun bisanya dikembalikan kepada masing-masing yang muncul dalam proses implementasi program. Implementasi Program Bantuan Perikanan di Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan (Studi Kasus Desa Kandang Jaya dan Desa Kusambi Hilir) dalam pengimplementasian nya juga tentu ada pendorong untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut. Berikut di uraikan faktor pendorong dalam Implementasi Program Bantuan Perikanan di Kecamatan

Lampihong Kabupaten Balangan (Studi Kasus Desa Kandang Jaya dan Desa Kusambi Hilir).

1. Perhatian pemerintah daerah terhadap Dinas Perikanan  
Dalam menjalankan program perikanan sudah berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari faktor pendorong pertama dan kedua.
2. Dengan adanya perhatian khusus dan partisipasi masyarakat dalam program ini maka program dapat berjalan secara maksimal. Dan dengan adanya program bantuan ini masyarakat sangat terbantu dan juga bisa memperbaiki hasil perekonomian masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari faktor pendorong pertama dan kedua. Dengan adanya perhatian khusus dan partisipasi masyarakat dalam program ini maka program dapat berjalan secara maksimal. Dan dengan adanya program bantuan ini masyarakat sangat terbantu dan juga bisa memperbaiki hasil perekonomian masyarakat

### Faktor Penghambat

Faktor penghambat dalam proses implementasi kebijakan merupakan suatu yang lazim terjadi dimana-mana, dan setiap program pasti mempunyai masalah masing-masing. Sehingga penanganannya pun bisanya dikembalikan kepada masing-masing yang muncul dalam proses implementasi program. Implementasi Program Bantuan Perikanan di Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan (Studi Kasus Desa Kandang Jaya dan Desa Kusambi Hilir) dalam pengimplementasiannya juga tentu ada penghambat untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut. Berikut diuraikan faktor penghambat dalam Implementasi Program Bantuan Perikanan di Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan (Studi Kasus Desa Kandang Jaya dan Desa Kusambi Hilir) sebagai berikut :

1. Faktor pertama yang mempengaruhi Implementasi Program Bantuan Perikanan Di Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan di Desa Kandang Jaya dan Desa Kusambi Hilir yaitu belum direncanakannya dengan baik mengenai kebutuhan yang diinginkan. Penyebabnya adalah karena banyaknya masyarakat yang juga menginginkan bantuan tersebut sehingga berdampak pada penyaluran fasilitas belum sepenuhnya bisa disalurkan
2. Faktor kedua yang mempengaruhi Implementasi Program Bantuan Perikanan Di Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan di Desa Kandang Jaya dan Desa Kusambi Hilir yaitu belum adanya kelanjutan dari program ini seperti kurangnya penyuluhan dan kunjungan dari petugas disebabkan karena instansi masih kekurangan anggota PPL atau penyuluh perikanan. Karena kurangnya staf PPL sehingga penyuluhan ataupun kunjungan yang dilakukan petugas masih jarang karena jarak tempuh satu Desa dengan Desa lainnya lumayan jauh.

### SIMPULAN

Implementasi Program Bantuan Kelompok Perikanan di Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan (Studi Kasus Desa Kandang Jaya dan Desa Kusambi Hilir) sudah baik. *Pertama*, subvariabel komunikasi pada Indikator konsistensi juga sudah sesuai terkait penyampaian informasi mengenai program bantuan perikanan oleh instansi sudah dilaksanakan dengan baik dan tentunya masyarakat juga menerima informasi tersebut dengan baik. *Kedua*, subvariabel sumber daya pada indikator wewenang di Desa Kandang Jaya dan Desa Kusambi Hilir sudah sesuai terkait tanggung jawab petugas dengan program perikanan sudah bertanggung jawab. *Ketiga*, subvariabel disposisi pada indikator respon implementor sudah sesuai di kedua Desa tersebut terkait respon petugas dalam menjalankan program perikanan sudah baik dan juga kelompok sangat terbantu dengan

adanya respon yang baik dari petugas. Kemudian indikator kemampuan petugas sudah sesuai di kedua Desa tersebut terkait kemampuan petugas dalam menjalankan program perikanan sudah baik. *Keempat*, subvariabel struktur biokrasi pada indikator *Standart Operating Procedures* (SOP) sudah sesuai di kedua Desa tersebut dalam menjalankan program perikanan pelaksana sudah menjalankan program ini sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan instansi. Dan indikator fragmentasi juga sudah sesuai di kedua Desa tersebut terkait fragmentasi dalam menjalankan program perikanan sudah berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari adanya kerjasama serta koordinasi yang dilakukan oleh pihak pelaksana dengan instansi dan pelaksana dengan kelompok.

Faktor Pendukung Bantuan Perikanan di Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan (Studi Kasus Desa Kandang Jaya dan Desa Kusambi Hilir). *Pertama*, adanya perhatian pemerintah daerah terhadap Dinas Perikanan ini salah satu faktor pendorong program bantuan kelompok perikanan dengan adanya perhatian khusus dari pemerintah maka program ini akan berjalan lebih maksimal. *Kedua*, partisipasi masyarakat dalam program perikanan partisipasi masyarakat dalam program bantuan perikanan juga sangat penting karena dengan adanya partisipasi dari masyarakat maka program yang diberikan oleh pemerintah akan berjalan lebih maksimal. Faktor Penghambat Dalam Bantuan Perikanan di Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan (Studi Kasus Desa Kandang Jaya dan Desa Kusambi Hilir). *Pertama*, Belum dirakurnya data mengenai kebutuhan yang diinginkan kelompok dan karena difisik anggaran penyebabnya karena banyaknya masyarakat yang juga menginginkan bantuan tersebut sehingga berdampak pada penyaluran fasilitas belum sepenuhnya bisa disalurkan. *Kedua*, Kelanjutan mengenai program ini belum ada, seperti penyuluhan dan kunjungan masih jarang dilakukan oleh petugas. Yang disebabkan karena instansi masih kekurangan anggota PPL atau penyuluh perikanan. Agar penelitian ini bermanfaat, maka diharapkan kepada Kepala Bidang Perikanan Kabupaten Balangan sekiranya dapat menambah jumlah petugas PPL atau petugas penyuluh agar program perikanan dapat berjalan dengan baik dan untuk penyaluran bantuan di Desa Kandang jaya dan desa Kusambi Hilir terkhusus fasilitas sekiranya dapat memberikan yang terbaik dan memberikan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan yang kelompok pinta. Selanjutnya kepada PPL penyuluh perikanan Kabupaten Balangan agar ada perbaikan dalam penyuluhan bantuan perikanan dan lebih seringnya terjun kelapangan untuk melakukan evaluasi lapangan atau pengecekan kepada kelompok yang sudah menerima bantuan apakah bantuan yang diberikan sudah berjalan dengan baik dan penyuluhan kepada masyarakat agar lebih memberikan pelatihan-pelatihan khusus tentang cara budidaya ikan serta pengolahan hasil ikan yang baik dan supaya para petani ikan bisa menghasilkan panen ikan yang tinggi setiap bulannya dan menghasilkan olahan-olahan ikan yang baru yang bermanfaat untuk pengkonsumsi, dan sepenuhnya dapat membantu perekonomian masyarakat dan menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Selanjutnya untuk kelompok perikanan di harapkan semoga kedepannya kelompok petani ikan bisa lebih berhasil dalam pembudidayaan ikan dan lebih baik lagi dalam memajukan perikanan yang ada di Kabupaten Balangan kemudian untuk pengetahuan supaya bisa lebih mandiri lagi mencari inspirasi-inspirasi cara pengelolaan ikan dan semoga kedepannya bisa membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

Anonim, Peraturan Bupati Balangan Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Dari Pemerintah Kabupaten Balangan

- Agustino, Leo,( 2019). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*, Edisi Revisi. Bandung: Alfabeta
- Anggara, Sahya. (2016). *Ilmu Administrasi Negara*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Affrian, R. (2024) ‘Implementasi Kebijakan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Studi Warung Remang-Remang Di Desa Sungai Buluh)’, *Jurnal Niara*, 16(3), pp. 520–524.
- Affrian, R., Sos, S. and AP, M. (2023) *Model-Model Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi Kebijakan*. CV. Bintang Semesta Media.
- Affrian, R., Sukrisyanto, A. and Kusbandrijo, B. (2021) ‘Evaluation of PT Adaro Indonesia’s Corporate Social Responsibility (CSR) Program Policy, South Kalimantan, Indonesia’, *Journal of Public Policy and Administration*, 5(3), p. 90.
- Ahdiat, R. and Afrilla, P.N.A.N. (2024) ‘IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG PENANGGULANGAN KABUT ASAP DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA’, *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(5), pp. 2518–2529.
- Anjasmari, N.M.M. and Bakhtiar, M. (2024) ‘IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 36 TAHUN 2018 TENTANG LARANGAN PENYELENGGARAAN REKLAME ROKOK DAN PRODUK TEMBAKAU PADA MEDIA LUAR RUANG DAN JALAN PROTOKOL DI KECAMATAN PARINGIN KABUPATEN BALANGAN’, *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(5), pp. 2469–2476.
- Anjasmari, N.M.M. and Hasna, N.O. (2023) ‘EFEKTIVITAS PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI PASAR PARINGIN KABUPATEN BALANGAN’, *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(10), pp. 4457–4465.
- Arlan, A.S. (2024) ‘Implementasi Peraturan Bupati Tapin Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Di Kabupaten Tapin: Studi Kasus di Kelurahan Bitahan’, *Administratus*, 8(2), pp. 56–68.
- Husaini, M., Raudah, S. and Amaliya, M. (2023) ‘IMPLEMENTASI PRORGAM PERLUASAN JANGKAUAN UMKM DI KABUPATEN BALANGAN’, *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(6), pp. 2134–2139.
- Riadi, S., Ahdiat, R. and Hidayatullah, G.M. (2023) ‘PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NO 7 TAHUN 2021 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM STUDI KASUS RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN KEBERSIHAN PADA PASAR INDUK AMUNTAI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA’, *Al’iidara Balad*, 5(1), pp. 25–30.
- Saputra, T. *et al.* (2023) ‘Bibliometric Studies and Public Administration Research Potential on Stunting Problems’, *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, 6(2), pp. 197–211.
- Setiawan, I., Sukristyanto, A. and Ibnu Rochim, A. (2021) ‘The Implementation of Law Number 16 of 2019 a Case Study of Early Marriage Prevention in Hulu Sungai Utara Regency Indonesia’, *Journal of Public Policy and Administration*, 5(3), p. 117.
- Urahmah, N. and Isma, I. (2023) ‘IMPLEMENTASI UU NO. 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN UU NO. 1 TAHUN 1974 PASAL 7 AYAT (1) BATAS USIA PERKAWINAN: STUDI KASUS DI DESA PASAR SENIN DAN DESA RANTAWAN, KECAMATAN AMUNTAI TENGAH, KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA’, *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(12), pp. 5494–5500.
- Urahmah, N., Ulfah, R. and Riyanor, R. (2022) ‘IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH



KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA NOMOR 04 TAHUN 2016 TENTANG GERAKAN STOP BUANG AIR BESAR (BABS) DI KECAMATAN BANJANG (STUDI KASUS DESA KALINTAMUI, KALUDAN BESAR, PALANJUNGAN SARI)', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 1(3), pp. 849–855.

Mulyadi, Deddy. (2016). *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*, Edisi Revisi. Bandung: Alfabeta.

Mutiarin, Dyah dan Arif Zainudin.( 2014). *Manajemen Birokrasi dan Kebijakan*.Yogyakarta: Pustaka Belajar.

Pasolong, Harbani. (2016). *Teori Administrasi Publik*, Edisi Revisi. Bandung: Alfabeta

Satori, Djam'an dan Aan Komariah. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Subarsono, AG. (2016). *Analisa Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sugiyono, (2018). *Metode Penelitian*. Bandung: Alfabeta

STIA AMUNTAI (2022) 'Pedoman Penyusunan dan Penulisan Skripsi Program Studi Administrasi Publik', *Pedoman Penyusunan Skripsi*.